



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon (021) 3843348, Faksimile (021) 3453553  
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2496/SEK/OT1/III/2024

Jakarta, 28 Maret 2024

Hal : Evaluasi PMPZI Tahun 2024

- Yth.
1. Panitera Mahkamah Agung;
  2. Para Pejabat Eselon I di Mahkamah Agung;
  3. Kepala Pengadilan Militer Utama;
  4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia;
  5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (*Pilot Project*) Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), serta evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung tetap berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan capaian Reformasi Birokrasi, serta Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Dalam upaya menjaga tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas dan kualitas Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, seluruh Unit Kerja perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:
  - a. seluruh unit kerja yang melaksanakan pembangunan zona integritas, baik unit kerja yang belum meraih predikat WBK/WBBM maupun yang telah meraih predikat WBK/WBBM wajib melaksanakan penilaian mandiri atas pembangunan zona integritas pada tahun 2024 melalui aplikasi <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id> paling lambat 31 Maret 2024;
  - b. Seluruh Direktorat Jenderal Badan Peradilan dan Pengadilan Tingkat Banding diharapkan untuk terus mendorong dan mengupayakan keberhasilan



pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya untuk meraih predikat WBK/WBBM melalui evaluasi/penilaian mandiri secara berjenjang atas program kerja pembangunan Zona Integritas yang fokus pada pencapaian dua sasaran utama yaitu terwujudnya Peradilan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan peradilan yang prima.

3. Dalam rangka mengukur hasil pembangunan zona integritas melalui pelaksanaan Pekan Survei atas Pembangunan Zona Integritas (Survei Perilaku Anti Korupsi dan Survei Peningkatan Kualitas Pelayanan) berbasis teknologi informasi, masing-masing Unit Eselon I agar dapat mengoordinasikan pelaksanaan Pekan Survei atas Unit Kerja yang berada di bawahnya pada bulan April 2024.
4. Tim Penilai Internal Mahkamah Agung segera melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja yang telah meraih predikat WBK/WBBM untuk kemudian menyampaikan hasilnya kepada Tim Penilai Nasional.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
5. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.

